

**IMPLEMENTASI PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM
KELUARGA HARAPAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI
(Studi Kasus Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Syariah Dan
Hukum

Oleh :
IMAM AZHARI
NIM.0203163137

PROGRAM STUDI SIYASAH (HUKUM TATA NEGARA)

PEMBIMBING I



Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
NIP.195919151997032001

PEMBIMBING II



Putri Eka Ramadhani BB, SH, M.Hum
NIP.198207202009012007



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1441 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM
KELUARGA HARAPAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI
(Studi kasus Di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)**

Oleh:

IMAM AZHARI
NIM. 0203163137

Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
NIP.195919151997032001

PEMBIMBING II



Putri Eka Ramadhani BB, SH, M.Hum
NIP.198207202009012007

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah**



Fatimah S, Ag, MA
NIP.19710320199703200

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Azhari

NIM : 0203163137

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

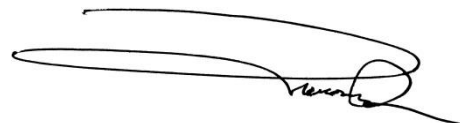
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Judul : **IMPLEMENTASI PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DITINJAU
DARI PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI (STUDI KASUS
KEC. TANJUNG TIRAM KAB. BATU BARA)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 12 September 2020



Imam Azhari
0203163137

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “IMPLEMENTASI PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DITINJAU DARI PRSEPEKTIF IMAM AL-MAWARDI (STUDI KASUS KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA)” Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi permensos no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di kecamatan tanjung tiram kabupaten batu bara, apa saja hambatan atau halangan yang dihadapi dalam proses implementasi permensos no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan, bagaimana implementasi permensos no. 1 tahun 2018 tentang progra keluarga harapan ditinjau dari perspektif imam al-mawardi. Dalam penelitian ini penulis menetapkan masyarakat penerima program keluarga harapan sebagai sample penelitian. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: *Observasi* (pengamatan), *Interview* (Wawancara) dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realita pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara masih kurang sesuai. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Tiram mengklaim bahwa keluarga penerima manfaat bantuan sosial ini sudah tepat sasaran dan tidak pernah mengalami kendala. Namun, setelah peneliti melakukan wawancara masih banyak terdapat penerima manfaat dari kalangan masyarakat menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena Penaping masih kurang memperhatikan koordinasi sensus penduduk terbaru, perencanaan kegiatan, dan ketepatan layanan terkait Program Keluarga Harapan. Sedangkan dalam perspektif Imam Al-Mawardi terdapat implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Tanjung Tiram masih jauh dari kata berhasil, Menurut Imam Al-Mawardi ini terkait dengan dua lembaga yang berperan dan bertanggung jawab yakni wizarah dan wazir. jadi implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Tiram belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sebab masing-masing struktur kelembagaan belum mengerti akan tugas dan fungsinya secara baik serta kurangnya koordinasi wizarah Tanfidzh (pimpinan tertinggi kementrian) dan wazir (sebagai pelaksana yang ada dibawahnya) sehingga tidak terimplementasikan dengan maksimal.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, ‘inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagain dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Di dalam penulisan skripsi yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI (STUDI KASUS KEC. TANJUNG TIRAM KAB. BATU BARA)** merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Peneliti banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah Swt dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan.

Peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibundaku yang tercinta **Alm. Abdul Rauf** dan Nur Asiah, yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan, baik materil maupun moril yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu kepada penulis.
2. Yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag.**
3. Yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, **Zulham M.Hum**, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Yang terhormat Ibunda, **Fatimah, S.Ag,MA**, selaku Ketua Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) sekaligus penasehat akademik penulis dan Bapak **Zaid Alfauza Marpaung, MH** selaku Sekertaris Jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Yang terhormat ibunda, **Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag** selaku pembimbing I dan **Putri Eka Ramadhani Batubara, M.Hum** selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
7. Ibu pimpinan perpustakaan **Nikmah Dalimunthe S.Ag, MH** serta karyawan yang telah memberikan pelayanan dan berbagai fasilitas literatur kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu pimpinan Kantor Badan Pusat Stastistika Kabupaten Batu Bara, **Dinar Butar-Butar SE M.Si** yang telah sudih memberikan informasi kepada penulis.
9. Bapak Camat Kecamatan Tanjung Tiram, **Alfitri Hidayat, S.Sos** beserta jajarannya, yang telah memberikan data-data keterangan yang dibutuhkan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

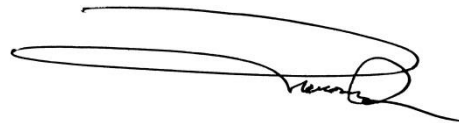
10. Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terimakasih kepada rekan sejawat umumnya Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) dan khususnya kelas D tahun 2016.

11. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt jualah peneliti berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat peneliti sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, 12 September 2020
Peneliti



IMAM AZHARI
NIM: 0203163137

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	13
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	16
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Manfaat Penelitian	18
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penelitian	24

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Implementasi Kebijakan.....	26
B. Program Keluarga Harapan.....	28

C. Biografi Imam Al-Mawardi	33
D. Deskripsi Kitab Adan al-Wazir	34

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kecamatan Tanjung Tiram.....	43
B. Luas Wilayah Kecamatan Tanjung Tiram	45
C. Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Tiram	47

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Progra Keluarga Harapan (PKH) Ditinjau Dari Perspektif Imam Al- Mawardi (Studi Kasus Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara)	44
B. Hambatan dan Halangan yang Dihadapi dalam Proses ImplementasiPermensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan	53
C. Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau dari Perspektif Imam al-Mawardi	60
D. Analisis Penulis	61

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL

Tabel I	38
Tabel II	39
Tabel III.....	40
Tabel IV	33
Tabel V.....	41
Tabel VI	41
Tabel VII.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara di dunia. Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang saja, melainkan masalah ini juga dialami oleh negara-negara maju meski jumlah angkanya relatif kecil.¹

Kemiskinan menjadi indikator utama dalam meningkatkan pembangunan suatu daerah, terlebih bagi Kabupaten Batu Bara. Sesuai dengan data yang dihimpun oleh penulis dari badan pusat statistik Kabupaten Batu Bara, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batu Bara memiliki persentase 22,31 persen, dengan persentase jumlah pertumbuhan ekonomi sebesar 1,14 persen pada tahun 2019. Sedangkan di Kecamatan Tanjung Tiram jumlah penduduk miskin sebanyak 5046 ribu jiwa dengan persentase 01,28 pada tahun 2019.²

Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Batu Bara, khususnya masalah fakir miskin maka pemerintah setempat melalui Dinas Sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Batu Bara. Salah satu program khusus

¹Isbannandi Rukmianto, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 20.

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara, *Batu Bara Dalam Angka*, data yang diambil adalah data keluaran 2019, data tahun 2020 belum di bukukan.

yang dikeluarkan pemerintah yakni Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.

Sebelumnya PKH ini sudah mulai berjalan sejak tahun 2007 dengan harapan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara Internasional di kenal sebagai program *conditional cash transfers* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil)

Pelaksanaan pemberdayaan pada masyarakat lokal termanifestasikan dalam bentuk berbagai tindakan kolektif dalam rangka melakukan perubahan kondisi kehidupannya. Tindakan kolektif tersebut merupakan jaminan kapasitas masyarakat dalam melakukan pengelolaan pembangunan secara mandiri, sejak di identifikasi kebutuhan dan masalah perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi pembangunan.³

Pada tahun 2018 Kementrian Sosial RI mengeluarkan regulasi baru tentang PKH, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Sosial Khofifah Indar

³Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 103.

Parawansa pada 8 Januari 2018, dan diberlakukan serta diundangkan oleh Kemenkumham dalam Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 187, pada tanggal 29 Januari 2018.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan mencabut dan tidak memberlakukan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940). Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diterbitkan dengan pertimbangan bahwa: untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan;

PKH merupakan program lintas kementerian dan lembaga, karena aktor utamanya adalah dari badan perencanaan pembangunan nasional, departemen sosial, departemen kesehatan, departemen pendidikan nasional, departemen agama, departemen komunikasi dan informatika, dan badan pusat statistic. Untuk

mensukseskan program tersebut, maka di bantu oleh tim tenaga ahli PKH dan konsultasi Bank.

Peraturan menteri sosial (permensos) no 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Masalah kesehatan yang menonjol di daerah pedesaan adalah tingginya angka kejadian penyakit menular, kurangnya pengertian masyarakat tentang syarat hidup sehat, gizi yang jelek da keadaan hygiene dan snitasi yang jauh dari kata memuaskan.⁴

Dahulu memang PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM

⁴ Peter Hagul, *Pembangunan Desa Dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1992), h. 91

dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.⁵

Program Keluarga Harapan ini dianggap Program yang berhasil. Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi Kriteria kepesertaan program dan memenuhi Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan.

Pada Program Keluarga Harapan terdapat banyak bimbingan untuk peserta Program Keluarga Harapan yang bertujuan sebagai salah satu pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok dalam mengatasi kesulitan atau memecahkan masalah untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.

Di dalam ajaran Islam sendiri sangat memperhatikan kesejahteraan sosial penganutnya, Allah Swt sebagai Tuhan menganjurkan umat Islam secara langsung di

⁵ Pancawangi.sideka.id diakses pada 3 Juli 2020 Pukul 12 : 03

dalam Al-Quran untuk memperhatikan kesejahteraan sosial. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 9⁶:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*.

Perhatian Islam terhadap kesejahteraan sosial tergambar dalam surah An-Nisa ayat 9 yang menyeru umat untuk manusia agar takut akan kelemahan (ketidak sejahteraan) generasi penerus mereka nanti. Artinya henddakah manusia memperhatikan kesejahteraan generasi penerusnya, hendaklah mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan sosial, dan nantinya mewariskannya kepada umat generasi berikutnya.

Terjemahan ayat tersebut adalah “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (Kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

⁶ Departemen Agama, Alquran dan terjemahan (Azzahidah, Jakarta, 2010) h.134

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ . متفق عليه .

Anas ra. berkata, bahwa Nabi saw. bersabda, *“Tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kami sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”*. (H.R. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa’i)

Sikap individualistis adalah sikap mementingkan diri sendiri, tidak memiliki kepekaan terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Menurut agama, sebagaimana di sampaikan dalam hadits di atas adalah termasuk golongan orang-orang yang tidak (smpurna) keimanannya.

Seorang mukmin yang ingin mendapat ridha Allah swt. Harus berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridai-Nya. Salah satunya adalah mencintai sesama saudaranya seiman seperti ia mencintai dirinya, sebagaimana dinyatakan dalam hadits di atas.

Hadits di atas juga menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai persaudaraan dalam arti sebenarnya. Persaudaraan yang datang dari hati nurani, yang dasarnya keimanan dan bukan hal-hal lain, sehingga betul-betul merupakan persaudaraan murni dan suci. Persaudaraan yang akan abadi seabadi imannya kepada Allah swt. Dengan kata lain, persaudaraan yang didasarkan *Illah*, sebagaimana diterangkan dalam banyak hadits tentang keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah swt.

Di sisi lain dari ayat ini dapat kita pahami, bahwa Allah Swt secara tidak langsung menyeru kepada hamba-Nya untuk tidak apatis dan egois dalam mencapai kesejahteraan, jangan hanya mementingkan diri sendiri, namun harus memperhatikan kesejahteraan orang lain, terutama generasi penerusnya. Hal ini sesuai dengan konsep persaudaran dalam Islam, bahwa umat Islam dengan umat Islam lainnya seperti bangun, saling menguatkan satu sama lain. Tentunya tidak terlepas dari konsep saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling memperbaiki atau mengingatkan kesalahan satu sama lain.

Dalam Islam juga diajarkan betapa pentingnya rasa kekeluargaan diantara sesama manusia lainnya (Hablum minannas), peka terhadap manusia lainnya yang membutuhkan pertolongan, konsep saling tolong-menolong dan rasa empati terhadap sesama untuk menjamin suatu kesejahteraan hidup juga terdapat dalam ayat lain, Allah Swt berfirman :

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

Artinya : *“Mereka mengutamakan (Orang lain) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka membutuhkan (apa yang mereka berikan itu)*
(QS. Al-Hasyr: 9).⁷

Dari ayat diatas dapat diambil konsep bahwa manusia dengan manusia yang lain senjatanya harus saling tolong-menolong dan memiliki rasa sosial serta dituntut untuk memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama.

⁷ Ibid h. 428

Keutamaan kesejahteraan dalam konsep sosial Islam adalah sistem yang menganut melibatkan faktor atau variabel keimanan (nilai-nilai Islam) sebagai salah satu unsur fundamental (kesejahteraan sosial) yang sangat dasar dalam mencapai kesejahteraan individu dan kolektif sebagai suatu masyarakat.

Negara adalah pihak berperan besar dalam mewujudkan kesejahteraan disamping individu dan masyarakat. Dengan mengacu kepadaketentuan syari'ah, pemerintah akan menerapkan kebijakan politik untuk mendahulukan kesejahteraan umat.

Dalam konteks kesejahteraan di Indonesia, Dinas Sosial merupakan lembaga yang memegang peranan terhadap kesejahteraan masyarakat, maka di adakan program-program dan serta kebijakan-kebijakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di setiap daerahnya masing-masing, salah satunya yakni melalui "Program Keluarga Harapan". Namun dalam pelaksanaannya Dinas sosial sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang telah dibuat belum sepenuhnya efektif dikarekan masih banyaknya temuan di masyarakat belum tepat sasaran atau pendataan yang tidak merata.

Seringkali perubahan pertumbuhan penduduk ini menjadi masalah. Akibatnya mengenai masalah penduduk yang sudah mendapat perhatian kalangan ahli secara serius.⁸ Jika dilihat dari perkembangannya dari tahun 2017-2019 (sampel di kecamatan tanjung tiram kelurahan tanjung kabupaten Batu Bara) bahwasanya tidak terlalu terlihat kenaikan yang signifikan dari penerima PKH tersebut, fakta di

⁸ George W. Barclay, *Teknik Analisa Kependudukan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 46.

lapangan pada tahun 2017 yang berjumlah 5 orang sampai pada tahun 2019 naik hanya menjadi 7 orang.

Menurut keterangan dari salah seorang penerima PKH yakni bapak Muhammad syafii Simarmata berasal Dari Lk.III kelurahan Tanjung tiram penerima dana bantuan Program keluarga Harapan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, berdasarkan wawancara dengan beliau, beliau menuturkan bahwa pada tahun 2017 ia bekerja sebagai nelayan, kemudian dengan adanya PKH yakni wujud dari penerimaan itu terwujud yakni pada tahun 2019 ekonomi beliau sudah membaik dan dapat dilihat dengan adanya kemajuan yakni dengan memiliki sebuah kapal, Bapak Syafii merupakan salah seorang dari beberapa warga penerima PKH di kecamatan Tanjung Tiram dengan jenis bantuan alur pendidikan, mengingat taraf ekonomi yang sudah membaik maka muncul usulan agar dana bantuan PKH beliau agar segera ditarik, namun pada kenyataannya dilapangan tetap saja nama beliau selalu terdaftar pada program tersebut dan banyak lagi kasus dengan sejumlah nama, seperti Bapak Syahrul dan bapak bambang novianto dari lingkungan VIII yang mempunyai kasus yang sama.

Beberapa kasus dilapangan yang peneliti temukan, diantara kasus yang menyita perhatian peneliti ialah kepada salah seorang warga yang bernama bapak Adnan, bapak Adnan merupakan warga yang juga tinggal di lingkungan I (bapak Acik yang menjabat sebagai kepala lingkungan) memberikan gambaran bahwa, bapak Adnan ini salah satu warga yang tinggal di lingkungan I yang sangat berhak untuk menerima bantuan program PKH dan nama nya sudah selalu di usulkan agar

mendapatkan bantuan dana tersebut namun pada kenyataannya nama pak adnan tidak pernah biasa terdaftar.

Pada teorinya PKH dapat dikatakan sebagai jawaban dari kondisi bangsa Indonesia yang kian terpuruk. Alasan sederhananya, kementerian sosial berusaha meretas dua masalah klasik yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Dan sudah kita ketahui bahwa sasaran dari PKH ini adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin serta kriteria ibu hamil/menyusui dan komponen pendidikan dengan kriteria anak SD sampai SMA.

Namun pada kenyataan penerapan Program Keluarga Harapan dilapangan tidak selalu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, bahwasanya penerima Program Keluarga Harapan ini banyak yang tidak tepat sasaran serta lemahnya pengawasan dana yang diberikan pemerintah kepada keluarga penerima PKH sehingga dana yang sudah ditentukan kegunaannya oleh pemerintah tidak memberi dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan pendidikan anak (dana digunakan untuk kebutuhan lain).

Kaitannya dengan konsep wazir menurut Imam Al-Mawardi, wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah Negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijakan publik demi kepentingan rakyat, dalam konteks kekinian wazir yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah kementerian sosial sebagai pembantu kepala negara yang mengatur, mengawasi kehidupan rakyatnya dalam kehidupan sosial demi terjaminnya kelayakan hidup,

sesuai yang tertuang dalam butir Pancasila pada sila ke-2 yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, Implementasi Program Keluarga Harapan mempunyai kaitan erat dengan konsep *wazir* yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam bukunya yakni *AlAhkamu Sultuniyah*, Dalam buku beliau dikatakan bahwa konsep wazir ada 2 yakni *Wizarah Tawfidh* dan *Widzar Tanfidz* yakni memiliki tugas membantu kepala Negara dalam pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan kekinian *Wizarah Tawfidh* ialah Perdana Menteri sedangkan *Wizarat Tanfidz* sebagai lembaga eksekutif atau sebagai pelaksana. Yang akan penulis bahas dalam penelitian penulis ialah *Wizarah Tanfidz* sebagai lembaga eksekutif yakni pelaksana yang dalam hal ini ialah Menteri Sosial sebagai lembaga yang bertugas sebagai pelaksana pembantu kepala negara dalam bidang sosial masyarakat dan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan salah satunya ialah permensos nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Dalam penelitian penulis hendak melihat pelaksana fungsi dari lembaga Al Wizar Tanfidz dalam hal ini kemensos sebagai lembaga pelaksana pembantu kepala negara demi menjamin pemerataan bantuan sosial dalam menjalankan fungsinya dalam pelaksanaan permensos no. 1 tahun 2018 yang banyak memunculkan fakta di lapangan khususnya masyarakat bawah bahwa jenis bantuan tidak merata khususnya di lingkungan unit paling bawah seperti yang terjadi di kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: **“IMPLEMENTASI PERMENSOS NO.1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DITINJAU DARI PERSFEKTIF IMAM AL-MAWARDI (STUDI KASUS di KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA)”**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini merupakan batasan penulis agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu yang penulis fokuskan pada penulisan skripsi ini ialah **Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Ditinjau Dari Perspektif Al-Imam Mawardi (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara).**

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas maka dapat dideskripsikan berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan penelitian ini yaitu **“Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Ditinjau Dari Persepektif Imam Al-Mawardi (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)”**.

Maka penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut:

a. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Keberhasilan implementasi dengan demikian sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang

mendalam mengenai bagaimana berbagai elemen tersebut dapat bekerja bersama-sama secara harmonis, yang ditandai dengan: interaksi antara aktor-aktor, kapasitas pelaksanaan lapangan, strategi penyampaian informasi, atau sosialisasi, dan kapasitas organisasi.

b. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagai dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semaca ini secara Internasional dikenal sebagai program *condition cash transfer* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

c. Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara

Kecamatan Tanjung Tiram merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Batu Bara provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah sekitar 43,92 km².

Kecamatan Tanjung Tiram sendiri terdiri dari 2 kelurahan dan 8 desa diantaranya ialah Guntung, Bagan Dalam, Suka Maju, Tanjung Tiram, Bogak, Suka Jaya, Kampung Lalang, Bagan Arya, Pahlawan, Bandar Rahmat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Permensos No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Kemudian diuraikan dalam beberapa submasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi permensos no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di kecamatan tanjung tiram kabupaten batubara ?
2. Apa saja hambatan atau halangan yang dihadapi dalam proses implementasi permensos no. 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
3. Bagaimana implementasi permensos no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di tinjau dari perspektif imam al-mawardi?

D. TUJUAN PENELITIAN

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang di lakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi permensos no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara.
2. Untuk mengetahui hambatan atau halangan yang dihadapi dalam proses implementasi permensos no. 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
3. Untuk mengetahui implementasi permensos no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di tinjau dari perspektif imam al-mawardi.

E. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Eksistensi kajian pustaka dalam bagian ini dimaksudkan oleh penulis untuk memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian tentang Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawadi (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa literatur yang relevan untuk mendukung penelitian. Beberapa referensi yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Fitri Puspitasari Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis sebuah skripsi pada tahun 2015 yang berjudul *"Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul"*. Dalam penelitian tersebut lebih spesifik untuk mengangkat permasalahan bagaimana dinamika peranan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul yaitu bagaimana perannya pendamping dalam program keluarga harapan yang dilakukan di Kabupaten Bantul? Apa harapan pendamping dan harapan peserta dalam Program Keluarga Harapan (PKH)? Dan juga apa kendala yang dihadapi oleh pendamping dan bagaimana solusinya ketika pendamping dihadapi permasalahan, untuk menjawab rumusan permasalahan diatas peneliti melakukan observasi wawancara dengan subyek penelitian seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH), disertai dengan pengambilan data dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran

pendamping dalam program keluarga harapan yang dilakukan di Kabupaten Bantul adalah bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tentang prosedur yang harus dilalui, validasi data peserta Program Keluarga Harapan (PKH), memberikan motivasi, pengawasan dan pendampingan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) agar memenuhi kewajiban-kewajibannya dan juga menjembatani peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten/kota, dan bertugas membuat laporan baik laporan harian, bulanan ataupun tahunan.

2. Tri Ramadhan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjad Mada menulis sebuah Tesis pada tahun 2010 yang berjudul *"Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberdayaan Masyarakat I Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara"* Tesis ini membahas antara lain jalannya implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Ada beberapa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), yakni indikator tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Sementara itu indikator tambahan juga digunakan untuk menilai keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program pemberdayaan masyarakat, yakni pemberdayaan dengan kebijakan dan perencanaan, pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik, serta pemberdayaan melalui pendidikan dan pengetahuan. Semua indikator itu diletakkan pada sub masing-masing pada bab inti pembahasan. Kemudian tidak lupa pula disertakan juga persepsi warga miskin Kelapa Gading dalam menilai kinerja implementasi Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Sri Masita Laluang, menulis jurnal yang berjudul *"Implementasi Program Keluarga Harapan"* Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana yaitu unit pengelola Program Keluarga Harapan (PKH) kabupaten dan pendamping dengan bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah antara lain: pendataan calon peserta, sosialisai, pertemuan kelompok, pencairan dana bantuan, dan kurangnya kesadaran peserta dalam melaporkan status kepesertaan.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian yang akan dilaksanakan yakni terletak pada objek permasalahan yang akan diteliti yaitu pada penelitian terdahulu lebih spesifik membahas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan implementasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan. Penelitian terdahulu juga menggunakan penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan lebih difokuskan pada Implementasi Pemensos No. 1 Tahun

2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Ditinjau Dari Persepektif Imam Al-Mawardi (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara).

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian tersebut secara keseluruhan berbeda. Baik dari segi persepsi kajian maupun dari segi metodologi.

F. MANFAAT PENELITIAN

Di harapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya:

1. Skripsi ini diharapkan mampu memberikan wacana bagi Mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas Syariah pada jurusan Siyasah.
2. Dari segi teoritis, di harapkan agar dapat menambah wawasan keilmuan pengembangan keilmuan bimbingan dan penyuluhan islam khususnya ilmu dakwah dan pada umumnya yang berhubungan dalam rangka mengetahui kondisi peserta program keluarga harapan (PKH).
3. Dari segi praktis di harapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan terkait dengan pengentasan kemiskinan program keluarga harapan di kecamatan tanjung tiram, kabupaten batu bara.
4. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan pada bidang ini.

5. Kemudian diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi.
6. Di harapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai implementasi permensos no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan dan tinjauan dari persfektif imam al-mawardi

G. METODE PENELITIAN

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang di lakukan penulis yaitu:

1. Pendekatan penelitian.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁹

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris karena penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan implementasi permensos no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di tinjau dari persfektif imam al-mawardi.

⁹<https://idtesis.com/> diakses pada 3 Juli 2020 Pukul 12 : 03

2. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas serta konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (social approach). Dalam penelitian lapangan perlu ditentukan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yang menjadi populasi penelitian kali ini adalah keluarga yang menerima program keluarga harapan.

3. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara.

4. Sumber data.

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Sumber data tersebut adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga disebut asli. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari coordinator, pendamping dan penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun melalui hasil wawancara kepada sejumlah keluarga yang menjadi penerima program keluarga harapan.

- b. Sumber data skunder adalah sumber data yang di peroleh lewat pihak lain, tidak langsung di peroleh dari subjek penelitian. Data sekunder ini di dapatkan secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data dalam penelitian digunakan untuk mendukung data primer, yang meliputi buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini.

5. Pengumpulan data.

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang di jadikan teknik pengumpulan data adalah:

- a. Observasi adalah teknik untuk mengamati secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung tentang pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan. Metode ini di gunakan untuk mengumpulkan data-data dari lapangan dengan jalan menjadi partisipan langsung di lokasi penelitian yaitu program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
- b. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Wawancara yang di lakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai sejumlah keluarga yang menerima program keluarga harapan.

6. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa catatan yang dapat di pertanggung jawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Dokumentasi berupa pengumpulan data berupa catatan merupakan objek perolehan informasi dengan memperhatikan tiga macam sumber yaitu, tulisan, tempat, dan kertas atau orang. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang di lakukan dengan cara:

- a. Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat di pahami maknanya.
- b. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir yang di lakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab pertama: pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan di lakukan oleh penulis, yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua: penulis melangkah kepada gambaran umum tentang implementasi permensos no 1 tahun 2018 program keluarga harapan (pkh), membahas perspektif imam al-mawardi terhadap wizarat.

Bab ketiga: dalam bab ini, penulis akan mengkaji tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, kondisi demografis, tingkat pendidikan dan kehidupan social di dalam masyarakat.

Bab keempat: merupakan bab inti, karena penulis akan membahas secara terperinci tentang penelitian karena penulis memaparkan penelitian terhadap pandangan sejumlah masyarakat terutama bagi keluarga yang menerima program keluarga harapan (pkh).

Bab kelima: penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan uraian-uraian yang telah di bahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang penutup dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi Kebijakan

Salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan public adalah tahap implementasi. Implementasi kebijakan adalah tahap lanjutan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas dan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lester dan Stewart menjelaskan bahwa “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dari berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.”¹⁰

Sementara Widagdo menjelaskan Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu. Kedua penjelasan tersebut menjelaskan bahwasanya dalam implementasi kebijakan memerlukan berbagai sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Seperti dijelaskan oleh Jones dalam Widodo, pelaksanaan kebijakan menuntut adanya beberapa syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan organisasional yang dalam hal ini sering disebut *resources*. Oleh karena itu Jones merumuskan batasan implementasi yang dalam hal ini adalah proses peneriaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang dikerjakan. Berikut hal tersebut Meter dan Horn memberikan batasan implementasi sebagai:¹¹

¹⁰Wahab, Sholichin Abdul, 2007. “*Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*”. Bumi Aksara, Jakarta, h. 104.

¹¹Subarsono AG. 2006, “*Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*”. (Pustaka Pelajar, Yogyakarta) h. 99

“Tindakan yang dilakukan oleh inividu pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan alam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakkan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”

Batasan atau pengertian tentang implementasi kebijakan tersebut mengindikasikan suatu kebutuhan akan mekanisme atau prosedur pelaksanaan kebijakan. Berkenaan hal ini casley mengemukakan suatu metode dengan 5 langkah mekanisme yang perlu dilakukan dalam suatu implementasi kebijakan. Kelima langkah tersebut adalah sebagai berikut:¹²

- a. Identifikasi masalah
- b. Penentuan factor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah
- c. Mengkaji hambatan yang muncul dalam pembuatan keputusan
- d. Mengembangkan solusi-solusi paling layak
- e. Memantau secara berkelanjutan umpan balik yang terjadi dari tindakan yang dilakukan.

Teori-teori diatas menyimpulkan bahwasanya Implementasi meerupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aktor serta menggunakan berbagai sumber daya dalam pelaksanaannya dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, selain itu implementasi merupakan tahap yang krusial dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kebijakan. Bagaimana suatu kebijakan jika diimplementasikan tidak akan menimbulkan dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi yang dimaksud dalam Program Keluarga Harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini

¹²Abdul Wahab, 2012, *Anaisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta h .21

membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi diharapkan memutus rantai kemiskinan antar generasi memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara publik dengan antara harapan dan kebutuhannya.

B. Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi yang semuanya harus dilaksanakan.¹³ Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan.

Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai program berbasis pemberdayaan masyarakat, karena kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan penekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

2. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin.

¹³Muhaimin Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo 2009, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta:Kencana, h. 339.

Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RSTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara Internasional dikenal sebagai *condition cash transfer* (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).¹⁴

3. Tujuan PKH

Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs). Selain hal tersebut, masih terdapat beberapa tujuan lain dari PKH ini baik secara khusus maupun secara umum. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

- a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RSTM.
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RSTM.
- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari RSTM.
- d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi RSTM. RSTM yang menjadi sasaran PKH adalah sekelompok orang yang tinggal satu atap, baik yang terkait oleh pertalian

¹⁴Kementrian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2013, h. 4-5

darah (keluarga batih) maupun tidak (keluarga luas) yang memiliki pendapatan perkapita perbulan di bawah garis fakir miskin.¹⁵

Dalam tinjauan siyasah, pemimpin atau kepala Negara (*al-aimmah*) harus selalu hadir dalam segala urusan dan kebutuhan rakyatnya. Al-Mawardi menyatakan “pengangkatan pemimpin merupakan kewajiban kolektif untuk menjaga kelangsungan agama (*harasat al-din*) dan mengatururusan dunia (*siyasat al-dunya*). Oleh karena sebab itu sekalipun pemimpin hanya terdiri dari segelintir orang akan tetapi karena peran dan fungsinya besar maka dalam kajian siyasah masalah kepemimpinan selalu dikedepankan dari masalah lain yang secara kuantitatif unsur komponennya lebih besar dan lebih banyak.

Tuntutan agar pemimpin atau kepala Negara hadir dalam seluruh urusan rakyatnya mendorong adanya pelimpahan mandat kekuasaan, sebab tidak mungkin kepala Negara secara individual mengurus segala urusan hidup manusia. Dari sinilah muncul gagasan pembentukan lembaga-lembaga Negara dari mulai eksekutif (*wizarat imarat*), yudikatif (*qudhat*), dan lain-lain yang dizaman teokrasi dan otokrasi merupakan lembaga-lembaga pembantu kepala negara.

Penulis dalam hal ini cenderung memilih Bahasa lembaga kementerian karena perubahan zaman dari teokrasi, otokrasi, sampai demokrasi tidak banyak merubah lembaga mandataris kepala Negara ini. Dalam artian menteri merupakan orang-orang kepercayaan kepala Negara yang dipilih berdasarkan hak prerogatifnya. Sebagai orang-orang kepercayaan, para menteri yang diangkat menjadi pejabat pembantu kepala Negara dituntut bisa hadir dalam urusan rakyat sesuai dengan tugas masing-masing.

¹⁵Kementrian Sosial Republik Inonesia, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2013, h. 5

Sekalipun teorinya begitu akan tetapi faktanya sepanjang sejarah kekuasaan selalu terjadi konflik politik antara menteri dengan kepala Negara. Akibatnya para pembantu kepala Negara yang seharusnya hadir dala segala urusan rakyat justru “membangkang” perintah kepala Negara karena beda kepentingan politik di antara mereka.

Di zaman Dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Muthi'lillah (363 H/ 974 M) pada masa hidup Al-Mawardi pernah terjadi seorang menteri pada kementrian Hijabah (Sekretaris Kabinet) bernama Baha' al-Daulah. 'Adhud al-Daulah yang berpura-pura memperbaharui baiat kepada Sultan, tetapi ternyata berniat jahat mencopot selendang kebesaran sultan. Sultan berteriak minta tolong tetapi tidak satupun pejabat yang hadir membantunya, kecuali hanya seorang penyair bernama Syarif Ridha yang menyelamatkan sultan.

Hubungan yang tidak harmonis antara Kepala Negara dengan Menterinya semacam itu mendorong Al-Mawardi menyusun “peraturan” sistem pemerintahan kabinet berjudul “*Adab al-Wazir*” yang akan dibahas juga dalam penelitian penulis.

C. Biografi Imam Al-Mawardi

Nama lengkap Imam Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammadbin Habib bin al-Mawardi al-Bashri. Mawardi dilahirkan di Basrah tahun 364 H atau 975 M. Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan julukan al-Bashri ini dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka madzhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah.

Selain sebagai pemikir dan tokoh terkemuka ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Banyak karya-karyanya dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu Bahasa, sastra, tafsir, dan politik. Bahkan ia dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang menggagas tentang teori politik bernegara dalam dalam bingkai Islam dan orang pertama yang menulis¹⁶ tentang politik dan administrasi negara lewat buku karangannya dalam bidang politik yang sangat prestesius yang berjudul “*Al-Ahkam al-Sultaniyah*”.

1. Riwayat pendidikan al-Mawardi

Riwayat pendidikan al-Mawardi dihabiskan di Bagdad saat Bagdad menjadi pusat peradaban, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadits bersama teman-teman semasanya seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma’ali al-Azdi dan Muhammad bin Udai al-Munqari. Ia mempelajari dan mendalami berbagai ilmu keislaman dari ulama-ulama besar di Bagdad. Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu. Ia selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru lain untuk menimba ilmu pengetahuan. Kebanyakan guru Mawardi adalah tokoh dari imam besar di Bagdad. Diantara guru-gurunya adalah:

D. Deskripsi Kitab *Adab al-Wazir*

Kitab Adab al-Wazir (Etika Menteri) juga bisa disebut Qawanin al-Wizarat wa Siyasat Al-Mulk (Aturan lembaga kementerian dan kekuasaan Kepala Negara). Pada mulanya berbentuk naskah atau manuskrip yang tergabung dalam kumpulan karya

¹⁶ Imam Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2016) h. 24.

yang ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Habibullah al-Syanqithi penulis *Zad Al-Muslim Fi Ma Ittafaq 'Alaih al-Bukhari wa al-Muslim*.

Naskah ini pertamakali dianggap memiliki kaitan dengan *Ahkam al-Sulthaniyyah*, terutama bagian kedua tentang *Taqlid al-Wizarah* (mandate para menteri). Akan tetapi kontennya berbeda satu sama lain, dimana Adab al-Wazir lebih banyak berisi testimony-testimoni Al-Mawardi yang ditunjukkan kepada para menteri, sementara bab *Taqlid al-Wizarah* terfokus pada bentuk lembaga kementerian. Oleh karena itu disimpulkan naskah Adab al-Wazir merupakan karya yang berdiri sendiri yang dinamai “penemunya” dengan nama Adab al-Wazir li al-Mawardi.

Naskah ini lalu diedit oleh Abd al-Aziz Amin Al-Khaniji dan diterbitkan pertamakali oleh Penerbit Al-Khaniji, Kairo pada 1929. Kemudian kitab ini diedit kembali dengan nama *Qawanin al-Wizarat wa Siyasat al-Mulk* dan diterbitkan Penerbit Dar al-'Ushur, Kairo. Oleh karena itu karya Al-Mawardi yang satu ini memiliki dua nama sekaligus yakni Adab al-Wazir li al-Mawardi dan *Qawanin al-Wizarat wa Siyasat al-Mulk*.

Adapun sistematika penulisan dan konten kitab ini terdiri dari, Pertama, pendahuluan yang menjelaskan antara lain: kedudukan para menteri dan kemuliaan jabatan ini. Al-Mawardi berpendapat bahwa lembaga kementerian dibutuhkan dalam sistem kekhalifahan sebab Negara tidak akan mampu menangani seluruh tugasnya sendirian terkecuali dibantu orang-orang kepercayaan. Mereka itu para wazir yang melekat padanya kekuasaan dan posisi strategis layaknya “pedang dan pena”, tujuan pengangkatan menteri untuk membantu kepala Negara menegakkan agama dan keadilan, misi besar yang harus diemban para menteri untuk mewujudkan

keadilan dan keharmonisasian serta untuk menjauhkan terjadinya kesewenang-wenangan dan kekacauan sipatan sikap yang harus dimiliki para menteri.¹⁷

Kedua kementrian dari sudut filosofinya dan bentuk lembangnya. Dari sudut filosofi menteri itu diibaratkan sebagai jabatan berat tanggung jawabnya (wizr/tsaql) juga menjadi penopang kekuasaan kepala Negara (azr/dzahr), serta mejadi pihak yang diminta pertimbangan kepala Negara (wazr/malja). Adapun bentuk lembaga diklasifikasikan ke dalam dua kementrian yaitu: wizarah al-tafwidh (Perdana Menteri atau Menteri Koordinator) yang berfungsi administrator (al-qalm) sekaligus pertahanan (al-difa). Semua kekuasaan kepala Negara dapat dilimpahkan kepadanya kecuali urusan pengangkatan putra mahkota. Wizarat al-tanfid (menteri teknis/departemen) yang membidangi urusan-urusan tertentu untuk kesejahteraan rakyat.

Ketiga, fungsi menteri sebagai pengawal pertahanan (al-difa), baik untuk kepala Negara, pertahanan Negara, pertahanan lembaga dan pertahanan rakyat. Keempat pelayanan lembaga (al-iqdam) kementrian dari segi teknis masing-masing lembaga dan fungsinya. Secara garis besar pelayanan lembaga keentrian dikelompokkan berdasarkan dua fungsi sekaligus, yakni menarik hal yang bermanfaat untuk kepentingan umum dan menangkal ancaman dan menolak segala hal yang membahayakan orang banyak.¹⁸

Kelima, membangun integritas lembaga kementrian (al-hidr) untuk mencegah terjadinya disabilitas kekuasaan. Al-Mawardi menyebutkan integritas dalam empat konteks sekaligus, seperti berikut:

¹⁷ Al-Mawardi, *Adab al-Wazir* (Kairo: Maktabat Al-Khaniji, 1994), h. 2-9

¹⁸ Al-Mawardi, *Adab al-Wazir*, h. 13-18

1. Konteks ketuhanan. Integritas harus dibangun di atas moralitas dan ajaran teologis dengan cara taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya;
2. Konteks kekuasaan. Menurut Al-Mawardi integritas para menteri perlu dibangun berdasarkan loyalitas subyektif. Yang dimaksud loyalitas subyektif disini adalah menteri dituntut membantu kepala Negara dengan sungguh-sungguh akan tetapi dengan menjaga kewaspadaan individu untuk menghindari kesewenang-wenangan.
3. Konteks kepribadian. Integritas kepribadian seorang menteri mewujudkan berupa sikap disiplin, cerdas, tegas serta menghindari perbuatan yang dapat menurunkan martabat seperti korupsi dan menghalalkan segala cara serta berkhianat. Sebagai pribadi seorang menteri harus menyusun tak-tik dan strategi, melaksanakan mandate an tanggungjawab, memecahkan masalah serta cara mengorganisasikan dan mengendalikan para pegawai bawahan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kecamatan Tanjung Tiram

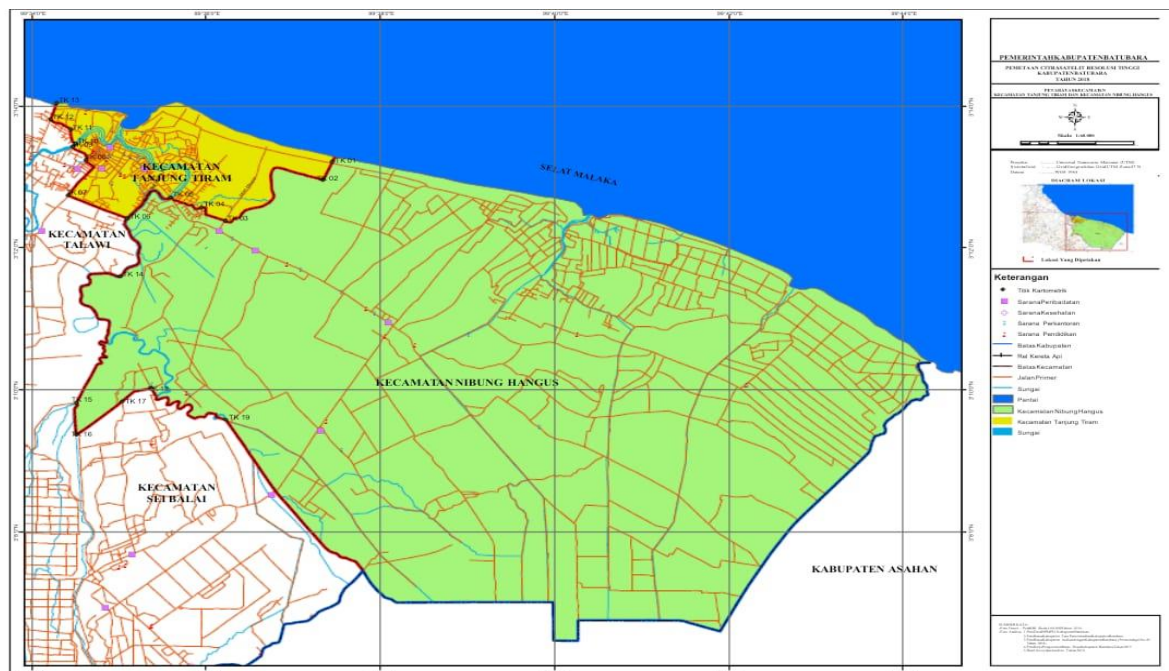
Tanjung Tiram adalah sebuah kecamatan di Kabupaten BatuBara Provinsi Sumatera Utara Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas wilayah lebih kurang 173,79 km² dengan kepadatan penduduk sebesar 344 jiwa/km² yang terbagi dalam 8 Desa dan 2 Kelurahan.

Sebagian besar wilayah ini berada dipinggir laut dan karena itu juga nelayan merupakan mata pencarian utama, disamping pertanian dan perkebunan. Kantor Ibu kota kecamatan ini terletak hanya beberapa ratus meter dari pinggir laut yang langsung menghadap selat Malaka.

1. Batas

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara, maka wilayah Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Mara memiliki berbatasan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

PETA KECAMATAN TANJUNG TIRAM



Sumber : BPS Kabupaten Batu Bara

Tabel I

Mengenal Kecamatan Tanjung Tiram

Letak Daerah	Berbatasan Dengan
Sebelah Utara	Selat Malaka
Sebelah Selatan	Kecamatan Nibung Hangus
Sebelah Barat	Kecamatan Nibung Hangus
Sebelah Timur	Kecamatan Talawi

Sumber : Badan pusat statistika kabupaten Batu Bara, Tahun 2018¹⁹

¹⁹Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti, pihak BPS Kabupaten Batu Bara memberikan keterangan bahwa data ini adalah data keluaran 2019, karena data pada tahun 2020 belum dibukukan oleh BPS.

B. Luas Wilayah

Kecamatan Tanjung Tiram merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Batu Bara provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah sekitar 43,92 km².

Kecamatan Tanjung Tiram sendiri terdiri dari 2 kelurahan dan 8 desa diantaranya ialah Guntung, Bagan Dalam, Suka Maju, Tanjung Tiram, Bogak, Suka Jaya, Kampung Lalang, Bagan Arya, Pahlawan, Bandar Rahmat

TABEL II
Luas Wilayah Menurut Desa/ Kelurahan

Desa/Kelurahan	Luas Daerah (Km ²)
(1)	(2)
Bagan Dalam	1,37
Suka Maju	2,85
Tanjung Tiram	0,71
Bogak	0,58
Suka Jaya	1,13
Kampung Lalang	2,1
Bagan Arya	15,71
Pahlawan	4,72
Bandar Rahmat	8,75
Guntung	6,00
JUMLAH	43,92

Sumber : Kantor Camat Tanjung Tiram

TABEL III
**Banyaknya Dusun dan Lingkungan Menurut Desa/Kelurahan
Tahun 2018**

Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun	Jumlah Lingkungan
(1)	(2)	(3)
Guntung	8	-
Bagan Dalam	10	-
Suka Maju	14	-
Tanjung Tiram	-	9
Bogak	10	-

Suka Jaya	10	-
Kampung Lalang	5	-
Bagan Arya	-	2
Pahlawan	12	-
Bandar Rahmat	6	-
JUMLAH	75	11

Sumber : Kantor Camat Tanjung Tiram

Tabel IV
Klasifikasi Wilayah Administrasi Pemerintah Menurut Desa/Kelurahan
Tahun 2018

Desa	Swadaya	Swakarya	Swasembada
(1)	(2)	(3)	(4)
Guntung	-	✓	-
Bagan Dalam	-	✓	-
Suka Maju	-	✓	-
Tanjung Tiram	-	-	✓
Bogak	-	-	✓
Suka Jaya	-	-	-
Kampung Lalang	-	-	-
Bagan Arya	-	-	-
Pahlawan	-	-	-
Bandar Rahmat	-	-	-
JUMLAH	-	3	2

Sumber : Kepala Desa/Lurah Se.Kecamatan Tanjung Tiram.

TABEL V
Jarak dari Ibu Kota Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi Tahun 2017

Desa/Kelurahan	Ibu Kota Kecamatan (KM)	Ibu Kota Kabupaten (KM)	Ibukota Provinsi (KM)
Guntung	4,30	40,3	136,00
Bagan Dalam	0,70	31,70	132,70
Suka Maju	0,65	35,00	131,70
Tanjung Tiram	0,20	36,00	132,00
Bogak	1,10	34,90	131,00
Suka Jaya	0,30	32,00	133,00
Kampung Lalang	1,00	35,35	131,35
Bagan Arya	0,80	35,70	131,80
Pahlawan	0,60	34,40	130,60
Bandar Rahmat	1,00	36,00	132,00

Sumber : Kantor Camat Tanjung Tiram

C. Jumlah Penduduk

TABEL VI
Jumlah Rumah Tangga Penduduk Menurut Jenis Kelamin Serta Sex Ratio
Di kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2018

Desa/Kelurahan	Jumlah Ruta	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Guntung	494	1039	1045	2084	99,43
Bagan Arya	1389	3278	3058	6336	107,19
Suka Maju	2001	4699	4298	8997	109,33
Tanjung Tiram	566	1320	1196	2516	110,37
Bogak	1744	4081	3712	7793	109,94
Suka Jaya	737	1662	1550	3212	107,23
Kampung Lalang	351	728	666	1394	109,31
Bagan Arya	361	736	669	1405	110,01
Pahlawan	588	1271	1156	2427	109,95
Bandar Rahmat	301	567	516	1083	109,88
JUMLAH	8532	19381	17866	37247	108,48

Sumber : Badan Pusat Stastistika Kabupaten Batu Bara

TABEL VII
PENDAMPING PKH KECAMATAN TANJUNG TIRAM

K e c a m a t a n	Desa/Kelurahan	Jumlah Penerima PKH di Desa	Desa/Kelurahan	Jumlah	Nama Pendamping	Jumlah Penerima PKH PerPenampi ng
T A N J U N G T I R A M	Bagan Arya	159	Bagan Arya	159	Ahmad Muhajir	286
	Kampung Lalang	127	Kampung Lalang	127		
	Bogak	488	Bogak	287+201	Musdalifah,A.Md Azmi Wijayanti Harahap	287 201
	Pahlawan	371	Pahlawan	151+120	Muhammaf Fauzan,ST Rahman Khoirun nazmi	251
	Suka Maju	533	Suka Maju	308+162+ 63	Rahaman Khoitun Nazmi Sulastri,SE M. Yasir Fahmi	282 308

	Bagan Dalam	624	Bagan Dalam	215+272+ 137	M. Yasir Fahmi Wandi Syaputra,S.Pd.I M. Azmi Akbar Akbar	278 272
	Bandar Rahmat	181	Bandar Rahmat	103+78	M. Azmi Akbar Dedek Syahrani	240
	Suka Jaya	533	Suka Jaya	189+344	Dedek Syahrani Irwansyah, SE	267 344
	Guntung	174	Guntung	174	Lutfi	265
	Tanjung Tiram	91	Tanjung Tiram	91	Mahmuda,S.I.Kom	
JUMLAH PENERIMA PKH DI KEC. TANJUNG TIRAM						3281

BAB IV PEMBAHASAN

A. Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara

Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2018 merupakan dasar hukum tentang Program Keluarga Harapan. Segala hal yang berkaitan dengan PKH diatur dan dijabarkan di dalam Peraturan Menteri Sosial tersebut. Di dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 dikatakan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar serta tercatat dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.²⁰ Di dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 juga disebutkan bahwa yang dinamakan Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.²¹

Dikatakan bersyarat dikarenakan untuk memperoleh bantuan PKH, sebuah keluarga harus mempunyai beberapa kriteria yang tidak hanya miskin, rentan, serta terdaftar dan tercatat di dalam data terpadu namun juga harus memiliki komponen yang dipersyaratkan harus ada. Di dalam Program Keluarga Harapan ada beberapa komponen yang harus dimiliki untuk tetap bisa memperoleh bantuan bagi seorang/keluarga tersebut. Yang pertama adalah komponen Pendidikan, yaitu keluarga/ seorang tersebut memiliki anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA seerajat/ponpes, dan anak usia 6 sampai 21 tahun

²⁰Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

²¹*Ibid*

yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Yang kedua adalah komponen kesehatan, yaitu keluarga tersebut mempunyai anak usia balita (0 tahun sampai 6 tahun) dan ibu hamil/menyusui. Dan komponen yang ketiga adalah kesejahteraan sosial yang dimana keluarga tersebut mempunyai tanggungan lansia (lanjut usia mulai 60 tahun) dan penyandang disabilitas berat.²²

Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Bantuan PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat bukanlah secara cuma-cuma tanpa adanya sesuatu hal yang harus dilakukan, KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun. Selain itu, peserta PKH juga diwajibkan hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan (P2K2) setiap bulan.²³

Seluruh anggota keluarga penerima manfaat harus memenuhi kewajiban kepesertaan PKH. Pemenuhan kewajiban oleh KPM PKH akan berdampak pada bantuan sosial dan hak kepesertaan lainnya. KPM yang memenuhi kewajibannya

²²*Ibid.* hal. 27

²³*Ibid.*, hal. 28.

akan mendapatkan hak sesuai ketentuan program. Seangkan KPM yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan penangguhan dan/atau penghentian bantuan sosial.

Sehingga di dalam kepesertaan PHK itu terdapat hak, kewajiban, dan sanksi. Hak yang dapat diperoleh oleh KPM PKH yaitu menerima bantuan sosial, pendampingan sosial, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta berhak mendapatkan bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energy, ekonomi, perumahan, asset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Sesuai dengan pasal 6 ayat b Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 bahwasanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) berhak menapatkan pendampingan PKH, dan sejak tahun 2014 Program Keluarga Harapan (PKH) mulai ada di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Di Kecamatan Tanjung Tiram hingga tahun 2020 terdapat 15 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendampingi Keluarga Penerima Manfaat bantuan PKH. Setiap pendamping mendampingi 200-300 peserta PKH, dan memastikan Bantuan Sosial PKH tepat jumlah dan tetap sasaran, melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan, dan memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan subsidi energy, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.

Terkait dengan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (PK2K2), merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH supaya KPM peserta PKH bisa menjadi lebih baik dalam pengelolaan rumah tangga dan harapannya adalah menjadi

keluarga yang mandiri, sejahteraan dan tidak kebergantungan dengan bantuan dari pemerintah secara terus menerus dan keluar dari zona kemiskinan. Sehingga Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dilaksanakan dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali di masing-masing kelompok peserta PKH yang telah terbentuk. Tidak jarang pertemuan dilaksanakan dengan cara bergantian dari rumah ke rumah anggota kelompok sekaligus menjalin silaturahmi dan membina keakraban antar sesama peserta PKH. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang KPM peserta PKH yang merasa sangat beranfaat karena bisa mengurangi beban yang selama ini dirasakan sangat membutuhkan perhatian dan bantuan dari pemerintah. Selain menerima bantuan berupa uang, dirinya juga merasakan manfaat lainnya dari Program Keluarga Harapan ini, yaitu dengan mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) juga menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan rumah tangga yang lebih baik lagi, terangnya.²⁴

Setiap kesempatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) pendamping sosial PKH memberikan berbagai macam materi modul, mulai dari modul kesehatan dan gizi, pengasuhan dan pendidikan, perlindungan anak, kesejahteraan sosial, dan modul ekonomi. Sehingga diharapkan para keluarga penerima manfaat selalu memperoleh pengetahuan baru dan tambah wawasan untuk mengelola keluarganya untuk semakin menjadi lebih baik lagi. Pendamping sosial PKH mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Bahkan bisa dikatakan sebagai ujung tombak utama dan garda terdepan yang bersinggungan

²⁴ Wawancara dengan Ibu Nurhayati, Keluarga penerima manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

langsung dengan masyarakat maupun stake holder tertentu dalam mensukseskan program nasional ini.

Pendamping sosial PKH setiap bulan melakukan verifikasi pendidikan pada fasilitas pendidikan (sekolahan/ponpes) untuk memastikan keaktifan dan kehadiran anak keluarga penerima manfaat bantuan PKH sekolah.²⁵ Selain itu, pendamping sosial PKH juga melakukan verifikasi kesehatan pada fasilitas kesehatan (posyandu/puskesmas pembantu) untuk memastikan kehadiran peserta PKH yang memiliki ibu hamil dan balita dalam melakukan kunjungan. Setiap waktu pendamping juga melakukan pemutakhiran data peserta PKH supaya data terkait kepesertaan selalu teraktul, sehingga kegiatan pendamping PKH tidak hanya kantor kecamatan, kantor kepala desa semata, namun juga melakukan kunjungan ke rumah peserta PKH guna memastikan pemutakhiran data tersebut benar-benar valid dan sesuai kenyataan.²⁶

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Tiram Kanupaten Batu Bara suah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini dikarenakan terdapat indikator yang belum mampu dilaksanakan dan dicapai secara baik, menyeluruh dan maksimal. Menurut Lawrence M. Friedman dengan teori hukumnya menjelaskan bahwa suatu hukum atau aturan dikatakan baik adalah jika aturan tersebut bisa bekerja dan diimplementasikan suatu aturan, terutama Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentu saja membutuhkan dukungan-dukkungan dari berbagai faktor, sehingga hukuman tadi bisa bekerja dengan maksimal sesuai dengan filosofi yang terkandung di dalam peraturan tersebut.

²⁵ Kementrian Sosial RI , *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai*, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial 2018, h. 33

²⁶ Wawancara dengan Ibu Masdalena, selaku ketua pendamping sosial PKH Kecamatan Tanjung Tiram.

Sebagaimana dijelaskan bahwa suatu peraturan atau tatanan norma hukum tidak bisa begitu saja dengan mudahnya bisa diterapkan di dalam masyarakat, terutama masyarakat yang majemuk dengan beraneka ragam kebudayaan, dan sosial kemasyarakatan yang bervariasi. Karena suatu hukum dapat bekerja dengan baik ketika didukung oleh komponen-komponen yang lainnya, karena hukum tidak berada di ruang yang hampa yang bebas dari nilai, melainkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sesuai dengan pernyataan Friedman yang mengatakan bahwa bekerjanya hukum tidak terlepas dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.²⁷ Untuk mampu memberlakukan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ini dengan maksimal, membutuhkan dukungan dari berbagai aspek. Tidak hanya substansi hukumnya dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 saja yang sudah baik, namun juga harus disertai dengan dukungan dari struktur hukum yang merupakan penegak atau pun pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial itu sendiri, yaitu pendamping sosial Program Keluarga Harapan dan stake holder lain yang terkait dan kemudian budaya hukum masyarakatnya juga haruslah turut serta mensukseskan pelaksanaan dari pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ini.

Di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 terdapat ayat yang menjelaskan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) berhak untuk mendapatkan bantuan komplementaritas. Dan ini sesungguhnya sudah sangat mulia tujuan dari pada pembuatan Peraturan Menteri Sosial ini. Namun dalam kenyataan ternyata indikator tersebut masih hanya sebatas cita-cita dari pada pembuatan hukum semata, meskipun ada beberapa dari peserta PKH yang sudah

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang : CV. Agung, 1989 h. 23.

menerima dan merasakan komplementaritas namun hal itu tentu saja masih jauh dari harapan berbagai pihak, karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat membutuhkan untuk meringankan beban kemiskinan mereka. Karena dengan diberikannya bantuan sosial PKH, ditunjang dengan bantuan komplementaritas di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energy, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain, pemerintah berharap keluarga yang sebelumnya berada di jurang kerentanan dapat dibantu dan didorong untuk kehidupan yang lebih layak. Besar harapan dengan adanya bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), dapat mengentaskan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM dari jurang kemiskinan dan tentu saja menjadi keluarga yang mandiri dan tidak bergantung kepada uluran bantuan dari pemerintah.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sudah sangat jelas menyebutkan tentang hak-hak yang bisa di dapatkan oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH), selain mendapatkan pendamping, mendapatkan bantuan sosial non pangan, bantuan PKH itu sendiri, juga berhak memperoleh komplementaritas, yang dimana seharusnya KPM peserta PKH berhak mendapatkan bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energy, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah da bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain, sesuai dengan pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ternyata berdasarkan penelitian di lapangan belum sesuai dengan harapan. KPM peserta PKH selama ini baru menerima bantuan PKH, BPNT (raskin), kartu Jamkesmas (Kartu Indonesia Sehat) KIS, kartu (Kartu Inonesia Pintar) KIP, dan itu pun juga belum secara menyeluruh bisa memperoleh, apabila menikmatinya.

Jadi sudah sepatutnya pemerintah perlu mengadakan upaya perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2018 supaya bisa terlaksana dengan maksimal dan tentu saja dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri.

Adapun hasil peneliti ketika melaksanakan pengumpulan data, kepada pendamping PKH ketika dimintai keterangan mengenai prosedur pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, beliau menyatakan bahwa semua kegiatan PKH di Kecamatan ini sudah berjalan sesuai prosedur. Atau bisa diartikan jika pihak-pihak keluarga penerima manfaat PKH sudah tepat sasaran.²⁸ Namun ada perbedaan pendapat dari warga Kecamatan Tanjung Tiram, yaitu Keluarga Penerima Manfaat masih belum merata dan menyeluruh, termasuk beberapa warga penerima bantuan sosial PKH ini adalah warga yang perekonomiannya memadai.²⁹

B. Hambatan dan Halangan yang Dihadapi dalam Proses Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tidak bisa terlepas dari peran berbagai macam elemen. Soerjono Soekarto dalam bukunya menjelaskan tentang Teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tiaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor, yaitu:³⁰ Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana fasilitas yang mendukung

²⁸ Ibu Nur Aisyah, *Wawancara Pendamping PKH Kel. Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara*, 2020.

²⁹ Ibu Endang, *Wawancara warga Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara*, 2020

³⁰ Soerjono Soekarto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

penegakan hukum. Factor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasayang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, faktor hukumnya sendiri (undang-undang) yang dimaksud disini adalah Permensos Nomor 1 Tahun 2018 bisa dikatakan sudah baik karena mempunyai tujuan yang luhur, yaitu adanya komplementaritas. Kemudian faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor yang berikutnya adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dimana di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ini masyarakatnya sangat terbuka dan menyambut baik akan keberadaan Program Keluarga Harapan ini. Faktor yang keempat yaitu faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, dan bisa diketahui bahwa kebudayaan masyarakat sekitar adalah tenggang rasadan musyawarah mufakat. Jadi ketika PKH ini di permulaan kedatangannya di Kecamatan tersebut sudah disambut baik dan antusias oleh warga karena bisa mengurangi beban hidup dan membantu akses di beberapa stake holder yang sebelumnya warga belum bisa menjangkaunya. Faktor terakhir yakni faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Mungkin faktor ini lah yang perlu untuk ditingkatkan lagi supaya bisa memaksimalkan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Karena ketika melakukan wawancara dengan pendamping PKH, secara tersirat terdapat kurangnya koordinasi dengan stake holder. Selain itu sudah sepantasnya ujung tombak Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu para

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memperoleh insentif yang memadai sesuai kinerja mereka yang bisa dikatakan tidak pernah kenal lelah dan tidak mengenal waktu baik siang, malam, setiap ada instruksi dari pusat (pimpinan) selalu bergerak dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, meskipun deadline agenda yang singkat dan tidak dapat ditunda. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pekerjaan mereka sangat rentan karena dengan waktu yang sangat singkat, dikeras deadline, dan untuk terjun dilapangan dan bertemu dengan KPM peserta PKH sering dihadapkan oleh zona yang sangat sulit untuk dijangkau sehingga sudah sepantasnya kalau para ujung tombak ini difasilitasi dengan bermacam-macam sarana dan prasarana untuk menunjang aktifitas dan kinerja mereka yang diantaranya perlindungan Jamsostek, perlindungan kesehatan (KIS), gadget (HP, Laptop), serta kendaraan bermotor, dan tunjangan insentif yang lebih memadai.

Selain dilihat dari sudut pandang teori efektivitas hukum tersebut di atas, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ketika dikaitkan dengan konsep keadilan yang lebih substantif lagi seharusnya bisa lebih dimaknai bukan hanya sekedar sebuah aturan tertulis dan diundangkan, namun juga harus menyentuh makna filosofis untuk apa suatu peraturan perundang-undangan ini dibuat yang sudah bisa dipastikan keadilan adalah ruh dari sebuah aturan itu sendiri. Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan ini dikemukakan oleh filsuf Yunani yaitu Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada pertimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan pertimbangan atau proporsi pada

teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.³¹

Dengan kata lain bahwa pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasarkan pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu di rumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Teori distributif yang dicetuskan oleh Aristoteles yang berpendapat bahwa Keadilan distributive adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributive berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang harus diberikan oleh Negara kepada warganya.³²

Berdasarkan hasil dari wawancara penelitian tersebut maka dapat disimpulkan, mengenai penyebab Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH menjadi tidak tepat sasaran faktor yang pertama adalah kurangnya koordinasi sensus penduduk perihal kondisi ekonomi penduduk secara terkini, yang dilakukan oleh pendamping PKH seharusnya bekerjasama dengan pihak aparat pemerintahan Desa dan Kecamatan terhadap siapa sajakah yang seharusnya atau berhak menerima bantuan sosial dana PKH tersebut. Karena ketika peneliti meminta keterangan

³¹ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019) h. 82.

³² *Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Bahder Johan Nasution, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jambi, Artikel, h. 7

melalui Perangkat Kecamatan di Kantor Kecamatan data kependudukan yang dipakai sebagai panduan pelaksana program PKH adalah masih data yang lama, sehingga perkembangan kondisi ekonomi penduduk terbaru belum diketahui.

Kemudian faktor kedua yaitu perencanaan dalam PKH. Perencanaan didalam program bantuan sosial ini yaitu keputusan mengenai apa yang akan dikerjakan ketika program sedang berjalan. Namun kenyataannya perencanaan dalam PKH di Kecamatan Tanjung Tiram belum matang dalam menciptakan kemanirian maupun mengurangi kemiskinan.

Faktor ketiga yakni ketepatan layanan dalam PKH. Di Kecamatan Tanjung Tiram ketepatan layanan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Keluarga Penerima Manfaat yang sebagian belum dapat menjalankan pengenalan jasa keuangan dengan tepat karena masih ditemukannya Keluarga Penerima Manfaat yang tidak dapat mengoprasiakn ATM dan menitipkan kepada tetangga pada saat pencairan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan.

Dari kurangnya hal tersebut, maka menyebabkan Keluarga Penerima Manfaat dari PKH ini bukan dari kalangan miskin saja melainkan masih ada dari masyarakat kalangan menengah ke atas yang menerima bantuan sosial PKH tersebut. Sehingga masih ada ketidak seimbangan antara tujuan dengan praktik secara kenyataan. Padahal sudah sangat jelas di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3 tertulis bahwa:

Sasaran PKH merupakan keluarga dari seorang miskin yang rentan dan terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Program pemerintah yang dikenal dengan PKH kepada rakyat ini sangat dianjurkan sekali karena

merupakan wujud dari kepedulian Pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya.

Solusi yang harus dilakukan yakni sebelum Pendamping PKH tersebut menetapkan dan memutuskan para penerima bantuan sosial PKH, seharusnya menyiapkan data-data penerima sevalid mungkin. Karena jika hanya mengacu pada data yang berasal dari kecamatan, hal ini masih menimbulkan tanda tanya terlebih di kalangan warga penduduk Kecamatan Tanjung Tiram mengenai data tersebut apakah data tersebut sudah sesuai dengan kondisi masyarakat terkini atau masih mengguakan data-data lama. Sebaiknya bagi Pendamping PKH mampu merealisasikan perencanaan kegiatan serta ketepatan layanan bagi peserta penerima bantuan sosial PKH agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Dan oleh karenanya, penting kiranya bagi Pendamping PKH tersebut benar-benar memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

C. Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau dari Perspektif Imam al-Mawardi

Menurut Imam Al-Mawardi terkait dengan dua lembaga yang berperan dan bertanggung jawab yakni wizarah tanfidzh dan wazir. Wizarah tanfidzh adalah pimpinan jabatan kementrian tertinggi yang memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan, yakni Menteri Sosial sebagai lembaga tertinggi negara yang mengurus urusan-urusan sosial masyarakat umum dan yang mengeluarkan serta memilik wewenang untuk mengeluarkan peraturan yang dinilai perlu dan penting untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat pada umumnya dan wazir merupakan pembantu atau pelaksana lapangan untuk melakukan pengawasan admistrasi, mengawasi

pendanaan dan pembagiannya, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten bersama dengan Pendamping Program Keluarga Harapan yang telah di tunjuk sebagai pelaksana dari program, sebagai ujung tombak pelaksana yang berkaitan dengan verifikasi pendataan, penyaluran dan pembinaan, jadi implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Tiram belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sebab masing-masing struktur kelembagaan belum mengerti tugas dan fungsinya secara baik seta kurangnya koordinasi wizarah Tanfidzh (pimpinan tertinggi kementrian) dan wazir (sebagai pelaksana yang ada dibawahnya).

Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa *Wizarah* (وِسَارَة) atau kementerian terbagi menjadi dua yaitu *Wizarah Tafwidh* dan *Wizarah Tanfizd*. Jenis yang pertama adalah: “jabatan *Wazir* yang diangkat oleh kepala Negara untuk diserahkan kepadanya urusan pemerintahan dan diberi hak penuh untuk bertindak.” *Wazir* ini bukan seorang perantara tetapi merupakan kepala Negara yang kedua. Dari pengertiannya, tentu akan muncul anggapan bahwa akan ada tumpang tindih (*overlap*), atau pertentangan antara tugas dan kekuasaan *Wazir* dengan kepala Negara, karena keduanya sama dalam tugas dan kekuasaan.

Lalu seberapa banyak fungsi kepala Negara bila *Wazir* ini sudah ada, begitu pula sebaliknya. Bagaimana pula mekanisme pertanggung jawaban perdana menteri ini kepada kepala Negara sedangkan keduanya mempunyai kesetaraan tugas dan wewenang.

Wazir jenis yang kedua adalah: “jabatan *Wazir* yang bertugas melaksanakan rupa urusan, tanpa mempunyai kekuasaan otonom. Segala ketentuan dan ketetapan tetap ditangan kepala Negara. *Wazir* petugas ini hanya melaksanakan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh kepala Negara.”³³ *Wazir* ini hanyalah perantara antara kepala Negara dengan rakyatnya, namun boleh mengemukakan tentang pendapatnya, yaitu *Wizarah Tanfizd*. *Wizarah Tanfizd* tidak memiliki kuasa atas urusan apapun kecuali hanya apa yang diperintahkan oleh kepala Negara, dan ini sangat berbeda sekali dengan *Wizarah Tafwidh*.

Menurut Imam Al-Mawardi, seluruh yang boleh dilakukan kepala Negara boleh pula dilakukan oleh *Wazir Tafwidh* kecuali tiga hal: pertama, memberi mandat kekuasaan kepala Negara karena kepala Negara dapat memberikan mandat yang ia pegang kepada siapa saja yang ia nilai pantas, sedangkan menteri tidak memiliki wewenang itu.

Kedua, kepala Negara dapat mencukupi kebutuhan umat terhadap institusi pimpinan pemerintahan, sedangkan *Wazir Tafwidh* tidak dapat melakukannya. ketiga, kepala Negara dapat memberhentikan pejabat yang diangkat oleh *Wazir Tafwidh* sedangkan *Wazir Tafwidh* tidak dapat memberhentikan pejabat yang diangkat oleh kepala Negara. Al-Mawardi dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer, dalam hal ini konsep kementerian Al-Mawardi mempunyai peran penting dalam sistem pemerintahan modern, lalu dikaitkan dengan *al-ahkam as- sultaniyyah* dengan pemerintahan pada saat ini, yaitu sistem kementerian yang digagas

³³ Al-mawardi, *al-ahkam al-sultaniyyah wa ul-wilayah ad-diniyyah*, al-Maktab al- Islami, Bairut, 1416 II, h. 25.

oleh Imam Al- Mawardi relevan dengan perkembangan sistem pemerintahan diabad sekarang ini, yaitu bahwa sistem pemerintahan yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan dalam bentuk sistem parlementer maupun kerajaan dimana kekuasaan berada ditangan kepala Negara dan menteri hanya sebatas pembantu kepala Negara dalam menjalankan pemerintahan.

Namun berkaitan dengan judul ini pembahasan hanya akan terfokus pada studi pemikiran seorang tokoh politik muslim yaitu Imam Al-Mawardi yang telah mencoba merinci sebuah teori sistem pemerintahan yang cukup lengkap dan independen, maksudnya merupakan buah pemikirannya sendiri bukan sekedar uraian sejarah pemerintahan Islam yang klaim sebagai sistem pemerintahan. Salah satu karya Imam Al-Mawardi yang telah lama dianggap sebagai “Dokumentasi Kunci dalam Evolusi Pemikiran Pōlitik Islam” adalah *al-ahkam as-sultaniyyah* dengan segala keterbatasan bahwa makna teori yang terkaji lebih rendah nilainya, namun buku tersebut merupakan karya tulis yang paling teoritis dalam memandang sekup dan pendekatan sistematiknya terhadap masalah kekhalifahan.

Oleh karena nuansa pembahasannya adalah Pemerintahan, maka yang jadi pertimbangan adalah seperti apa sistem pemerintahan Islam, apakah hanya sebatas sejarah atau memang dapat dirumuskan, lalu siapa yang telah mencoba merumuskannya, maka tokoh dan karya Imam Al- Mawardi yang penyusun kira lebih tepat dalam upaya menyingkap bahwa Islam adalah sempurna, dan dalam Islam dapat dirumuskan sebagai sistem pemerintahan. Selain pertimbangan bahwa beliau adalah seseorang yang berpengalaman

dalam pemerintahan sebagai hakim (*qadiy*).³⁴

Bahkan harus diakui bahwa pemikiran dan gagasannya memiliki pengaruh besar atas penulis-penulis generasi selanjutnya, terutama dinegri-negri Islam. Pengaruh ini misalnya, terlihat pada karya Nizamul Mulk Tusi, yakni Siyasat Nama, dan Prolegomena karya Ibnu Khaldun. Khaldun yang diakui sebagai peletak dasar sosiologi, dan pengarang terkemuka mengenai ekonomi politik tidak ragu lagi telah melebihi Imam Al-Mawardi dalam banyak hal.¹¹ tetapi para tokoh cendikiawan muslim yang mencoba menggagas atau merumuskan sebuah teori sistem pemerintahan yang rinci yang dapat dirujuk sebagai sistem pemerintahan Islam juga sukar ditemukan. Mereka lebih fokus dan tertarik pada kajian tentang Negara (daulah) atau Islam sebagai sebuah Negara dan kajian politik *siyasah*, sehingga karya yang banyak muncul kemudian adalah buku-buku *Fiqh ad-daulyyah* dan *Fiqh as-siyasiyya*. Disinilah adanya peluang mengisi ruang pembahasan fiqh pemerintahan *hukumah*.

D. ANALISIS PENULIS

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan penelitian penulis tentang Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi Studi Kasus Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dinilai masih jauh dari kata merata. Penulis melihat masih banyaknya masyarakat yang memiliki status sebagai keluarga tidak mampu namun belum tersentuh oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara untuk

³⁴ Yani Ansor menyatakan bahwa al-Mawardi pernah menjabat sebagai *Wazir*. <http://www.dawn.com/1989/05/01/op.htm/top>. Diakses tanggal 25-8-2020.

terjaring sebagai salah satu penerima Program Keluarga Harapan, sebaliknya juga masih adanya pendataan yang kurang akurat oleh para Pendamping PKH sehingga keluarga yang dilihat sudah mampu taraf hidupnya tetap mendapatkan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada sejumlah responden, 9 dari 11 responden memberikan keterangannya, kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa orang yang mendapatkan Program Keluarga Harapan hanya itu-itulah saja orangnya dengan kata lain tetap orang yang sama meskipun sudah dilakukan verifikasi ulang, padahal jika di data ulang masih banyak lagi keluarga yang layak mendapatkan yang belum terdata nama-namanya dan keluarga yang sudah bisa dikatakan layak tidak dicabut atau dicoret namanya dari penerima Program Keluarga Harapan.

Untuk memastikan hal tersebut, penulis juga mewawancarai salah seorang Pendamping PKH yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Pendamping PKH di Kecamatan Tanjung untuk memberikan konfirmasi apakah benar pendapat-pendapat yang dikatakan masyarakat yang namanya tercatat sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan, Ketua Pendamping PKH membenarkan hal tersebut bahwa sebenarnya dirinya dan rekan-rekan anggota pendamping lainnya sudah bekerja dan mendata para warganya yang berhak menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan, beliau memberikan keterangan bahwa dirinya selalu berkoordinasi dengan para anggota-anggotanya dilapangan bahwa mereka memiliki usulan nama-nama baru calon penerima Program Keluarga Harapan dan nama-nama tersebut sudah diajukan ke Dinas Sosial Kabupaten, tetapi tetap saja nama-nama yang kami usulkan tidak keluar

dalam daftar penerima Program Keluarga Harapan selanjutnya, justru nama-nama yang keluar selalu daftar yang sama, tidak ada pengurangan ataupun penambahan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa tidak adanya koordinasi antara Tanfidzh (kemsos kabupaten) sebagai pimpinan setingkat di atas dan wazir (sebagai pelaksana yakni para pendamping PKH yang terjun langsung kelapangan untuk melakukan verifikasi, pendataan dan penyaluran) sehingga terjadi kesenjangan antara yang mendapat dan tidak menapat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini dikarenakan terdapat indikator yang belum mampu untuk dilaksanakan dan dicapai secara baik dan maksimal. Indikator tersebut adalah Komplementaritas, yang dimana seharusnya Keluarga Penerima Manfaat peserta PKH berhak mendapatkan bantuan komplementer di bidang pangan kesehatan, pendidikan ekonomi, subsidi energy, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan peenuhan kebutuhan dasar lainnya sesuai dengan pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ternyata belumlah sesuai dengan harapan yang di cita-citakan.
2. Realita yang terjadi di lapangan mengenai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Tiram masih kurang sesuai. Pendamping Program Keluarga Harapan mengklaim bahwa keluarga penerima manfaat sudah tepat sasaran dan tidak pernah mengalami kendala. Namun, setelah peneliti melakukan wawancara masih terdapat penerima manfaat yang belum bisa menggunakan ATM ketika menerima bantuan dana Program Keluarga Harapan dan masih dapat penerima manfaat dari kalangan

masyarakat menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena Pendamping masih kurang memperhatikan koordinasi sensus penduduk terbaru, perencanaan kegiatan, dan ketepatan layanan kepada pejabat pemerintahan terkait Program Keluarga Harapan.

3. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi dari hulu ke hilir ujung tombak pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pihak-pihak terkait, baik dengan stake holder ataupun service provider. Belum adanya fasilitas yang menunjang kinerja Pendamping PKH dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pendamping PKH. Dealine agenda kegiatan yang sering mendadak dan waktu yang sangat singkat dari pimpinan (pusat), serta insentif yang belum memadai bagi pendamping sosial PKH dalam melaksanakan tugas peran dan operasional kegiatan. Masih kurangnya koordinasi wizarah Tanfidzh sebagai (pimpinan tertinggi kementrian) yakni kementrian Ssial pusat dan wazir (sebagai pelaksana yang ada dibawahnya yakni Dinas sosial kabupaten dan Pendamping Program Keluarga Harapan

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengharapkan kepada Pemerintah, Badan Pusat Statistik, Kemensos, Lembaga-lembaga pemerintah serta yang berperan langsung dalam program ini, sebagai berikut:

1. Bantuan sosial PKH seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan yang benar-benar membutuhkan dan bagi masyarakat yang mampu atau ekonomi menengah ke atas seharusnya jika ia sudah merasa mampu jangan sampai memakan hak orang miskin dan segera elapor untuk diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
2. Jika terjadi adanya penambahan penerima bantuan Program Keluarga Harapan seharusnya segera didaftarkan ulang kembali sehingga bagian mereka yang sudah ditentukan agar tetap utuh dan tidak dikurangi.
3. Dalam penetapan kriteria penerima Program Keluarga Harapan seharusnya benar-benar di cocokkan dengan kondisi di lapangan agar tepat sasaran, sehingga tidak menyusahkan aparat pemerintah kecamatan dalam mengambil kebijakan tertentu.
4. Selain itu, Pendamping PKH seharusnya selalu memperhatikan stiker cap yang telah di lekatkan ke rumah-rumah para anggota yang terdaftar sebagai penerima PKH, mengapa demikian karna masih banyak penulis dapati dan temukan dilapangan, satu keluarga terdaftar sebagai anggota penerima PKH namun tidak menempelkan

stiker yang diberikan oleh Pendamping PKH kepada mereka sebagai tanda bahwa mereka adalah keluarga penerima manfaat PKH.

5. Seharusnya, Pihak Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara menambah jumlah personil ataupun anggota pendamping program keluarga harapan di kecamatan Tanjung Tiram, karna jika dilihat rasio antara pendamping PKH dengan para penerima PKH tidak sepadan dan hal ini merupakan salah satu faktor tidak tersentuhnya para keluarga yang memang layak mendapatkan tetapi tidak terverifikasi oleh anggota pendamping PKH disebabkan keterbatasan anggota lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- AG, Subarsono *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Arifin Nasution, Muhammad, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Medan: Fisip Usu Press, 2000).
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Batu Bara, *Bata Bara Dalam Angka*, Data Keluaran 2019.
- Beratha, I Nyoman, *Pembangunan Desa Bewawasan Lingkungan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).
- Hagul, Peter, *Pembangunan Desa Dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 1992).
- Hanitijo, Soemitro Rooney, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, (Semarang: CV. Agung, 1989).
- Johan, Bahder Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Keluarga Harapan*, (Jakarta: 2013)
- Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah*, Terj, (Jakarta: Al-Azhar Press, 2017).
- Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Hukum—Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Darul Falah, 2016)
- Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Nawawi, Ismail, *Public Policy*, (Surabaya: ITS Press, 2009).

Pancawangi.sideka.id

Rapar, J.H, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019)

Rukmianto, Isbandi, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Sholichin, Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementa Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014).

Soekarto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Suti'ah, Muhaimin dan Listyo, Prabowo Sugeng, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009).

W. Barclay, George, Teknik Analisa Kependudukan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

Winarno, budi, *Kebijakan Publik (Teori Dan Proses)*, (Jakarta: Media Pressindo, 2008).

Wahab, Abdul, *Analisis Kebijakan Dari Forulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, 2012.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Willem Iskandar Pasar V Telp. 6615683 – 6622925, Fax. 6615683 Medan Estate 20371

Nomor: B.2351/SH.I/PP.00.1/12/2020

28 Juli 2020

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : SURAT IZIN PENELITIAN LAPANGAN

Yth.

Kantor Dinas Sosial dan Kantor Camat
Kecamatan Tanjung Tiram Kab. Batubara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan pengajuan judul proposal mensyaratkan untuk bersama surat ini kami mohon agar kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin untuk tugas penelitian, atas nama;

Nama : Imam Azhari
NIM : 0203163137
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah)
Judul Proposal : Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan Ditinjau Perspektif Imam Al-Mawardi
(Studi Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara)

Adapun kegiatan ini adalah untuk memenuhi tugas skripsi.

Demikian surat ini diperbuat, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kelembagaan



Dr. Syafuruddin Syam, M. Ag
NIP. 197505312007101001

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan.



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS SOSIAL

Jalan Besar Perupuk Dusun V Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh
Email : dinsosbb@gmail.com Kode Pos 21255

Perupuk, 11 Agustus 2020

Nomor : 460/1868 /DS/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Izin Penelitian Lapangan

Kepada Yth :
Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan
Siyasah (Hukum Tata Negara)
di_ Tempat

1. Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Nomor : B.2351/SH.I/PP.00.1/12/2020 Tanggal 28 Juli 2020 Perihal Surat Izin Penelitian Lapangan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan bahwa Dinas Sosial Kab. Batu Bara tidak berkeberatan untuk melakukan kegiatan dimaksud kepada saudara :
Nama : **IMAM AZHARI**
NIM : 0203163137
Program Studi : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Melakukan Penelitian dengan judul :
"Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)".
3. Agar yang bersangkutan menjaga norma dan etika ketika melakukan penelitian di dalam lingkungan Dinas Sosial.
4. Demikian Surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BATU BARA
SEKRETARIS


YANDI SISWANDI, S.Pd,M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19711028 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Sosial Kab Batu Bara (Sebagai Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA KECAMATAN TANJUNG TIRAM

JALAN PENDIDIKAN DUSUN XII DESA SUKA MAJU TANJUNG TIRAM 21253

Tanjung Tiram, 07 Agustus 2020

Nomor : 070/142
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Lapangan

Kepada Yth:
Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumut Medan

di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : B.2351/ SH.I/PP.00.1/12/2020 Tanggal 28 Juli 2020 Perihal Surat Izin Penelitian Lapangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami memberikan izin melaksanakan penelitian untuk memenuhi tugas skripsi, atas nama :

Nama : IMAM AZHARI
NIM : 0203163137
Program Studi : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah)
Jabatan : Staf
Judul Proposal : Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2008 tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau Perspektif Imam Al- Mawardi (Studi Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara).

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN TANJUNG TIRAM,
ALFIRI Hidayat S.Sos
PEMBINA
NIP. 19721122 199402 1 003

DOKUMENTASI



Gambar 1: Bersama Penampung PKH Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara









PEDOMAN WAWANCARA

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Berikut ini merupakan pedoman wawancara yang disifatkan general karena adanya keterkaitan di antara variabel sehingga beberapa indikator juga ditujukan kepada responden/informan yang berbeda.

NO	VARIABEL	Pertanyaan Wawancara
1.	IMPLEMENTASI PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI TENTANG WIZARAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA)	<p>1. Apakah Bapak/Ibu semua masyarakat sudah mengetahui peraturan menteri sosial no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan?</p> <p>2. Sepengetahuan Bapak/Ibu apakah program keluarga harapan sudah diberikan kepada yang berhak menerima, khususnya di kecamatan tanjung tiram ini?</p> <p>3. Coba bapak/ibu berikan penjelasan, apa saja berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari program keluarga harapan yang dicanangkan pemerintah?</p> <p>4. Bisakah bapak/ibu jelaskan apa saja bentuk bantuan dari program keluarga harapan?</p> <p>5. Sepengetahuan bapak/ibu, adakah masyarakat yang</p>

		<p>memang sudah bisa dikatakan taraf hidupnya sejahtera tetapi tetap saja masih menerima bantuan dari program keluarga harapan ini?</p> <p>6. Menurut bapak/ibu, apakah program keluarga harapan sudah tepat sasaran seperti yang diharapkan?</p> <p>7. Bolehkan bapak/ibu memberikan siapa-siapa saja orang yang memang mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan ini, tetapi pada kenyataan sesungguhnya yang bersangkutan tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan yakni sudah mampu secara finansial?</p>
<p>Catatan : Wawancara ini menggunakan metode wawancara semi structural dimana pertanyaan yang diajukan kepada responden hanya mengenai kepada hal-hal yang bersinggungan langsung dengan penelitian.</p>		

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama Responden	Petanyaan Pewawancara	Jawaban Responden
1.	RESPONDEN 1	1. Apakah Bapak/Ibu semua masyarakat sudah mengetahui peraturan menteri sosial no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan?	Tidak mengetahui.
		2. Sepengetahuan Bapak/Ibu apakah program keluarga harapan sudah diberikan kepada yang berhak menerima, khususnya di kecamatan tanjung tiram ini?	Ada yang berhak dan ada yang tidak berhak mendapatkan, masih adanya tumpang tindih.
		3. Coba bapak/ibu berikan penjelasan, apa saja berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari program keluarga harapan yang dicanangkan pemerintah?	Fotocopy KTP dan KK.
		4. Bisakah bapak/ibu jelaskan apa saja bentuk bantuan dari program keluarga harapan?	Bantuan Pendidikan Anak Sekolah.
		5. Sepengetahuan bapak/ibu, adakah masyarakat yang memang sudah bisa dikatakan taraf hidupnya sejahtera tetapi tetap saja masih menerima bantuan dari program keluarga harapan ini?	Masih banyak yang taraf hidupnya tinggi tapi tetap mendapatkan.
		6. Menurut bapak/ibu, apakah program keluarga harapan sudah tepat sasaran seperti yang diharapkan?	Belum tepat sasaran, karena masih adanya yang layak tetapi tidak menerima.
		7. Bolehkan bapak/ibu memberikan siapa-siapa saja orang yang memang mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan ini, tetapi pada kenyataan sesungguhnya yang bersangkutan tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan yakni sudah mampu secara finansial?	-

No.	Nama Responden	Petanyaan Pewawancara	Jawaban Responden
2.	RESPONDEN 2 (Ibu Endang)	1. Apakah Bapak/Ibu semua masyarakat sudah mengetahui peraturan menteri sosial no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan?	Tidak mengetahui.
		2. Sepengetahuan Bapak/Ibu apakah program keluarga harapan sudah diberikan kepada yang berhak menerima, khususnya di kecamatan tanjung tiram ini?	Masih sebagian saja yang tersentuh.
		3. Coba bapak/ibu berikan penjelasan, apa saja berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari program keluarga harapan yang dicanangkan pemerintah?	Fotocopy KTP dan KK.

		4. Bisakah bapak/ibu jelaskan apa saja bentuk bantuan dari program keluarga harapan?	Berbentuk Uang saja.
		5. Sepengetahuan bapak/ibu, adakah masyarakat yang memang sudah bisa dikatakan taraf hidupnya sejahtera tetapi tetap saja masih menerima bantuan dari program keluarga harapan ini?	Ada, masih banyak.
		6. Menurut bapak/ibu, apakah program keluarga harapan sudah tepat sasaran seperti yang diharapkan?	Belum tepat sasaran.
		7. Bolehkan bapak/ibu memberikan siapa-siapa saja orang yang memang mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan ini, tetapi pada kenyataan sesungguhnya yang bersangkutan tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan yakni sudah mampu secara finansial?	-

No.	Nama Responden	Petanyaan Pewawancara	Jawaban Responden
3.	RESPONDEN 3 (Ibu Nur Aisyah)	1. Apakah Bapak/Ibu semua masyarakat sudah mengetahui peraturan menteri sosial no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan?	Tidak mengetahui.
		2. Sepengetahuan Bapak/Ibu apakah program keluarga harapan sudah diberikan kepada yang berhak menerima, khususnya di kecamatan tanjung tiram ini?	Ada yang berhak dan ada yang tidak.
		3. Coba bapak/ibu berikan penjelasan, apa saja berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari program keluarga harapan yang dicanangkan pemerintah?	Fotocopy KTP dan KK.
		4. Bisakah bapak/ibu jelaskan apa saja bentuk bantuan dari program keluarga harapan?	Sembako (Beras 10 Kg) dan Uang Tunai 300.000
		5. Sepengetahuan bapak/ibu, adakah masyarakat yang memang sudah bisa dikatakan taraf hidupnya sejahtera tetapi tetap saja masih menerima bantuan dari program keluarga harapan ini?	Masih ada
		6. Menurut bapak/ibu, apakah program keluarga harapan sudah tepat sasaran seperti yang diharapkan?	Sudah tepat sasaran kepada keluarganya, namun begitupun banyak yang kaya masih mendapatkan, setelah adanya perjanjian menggunakan materai, maka banyak yang

			mundur, tetapi ada juga sebagian tidak takut.
		7. Bolehkan bapak/ibu memberikan siapa-siapa saja orang yang memang mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan ini, tetapi pada kenyataan sesungguhnya yang bersangkutan tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan yakni sudah mampu secara finansial?	-

No.	Nama Responden	Petanyaan Pewawancara	Jawaban Responden
4.	RESPONDEN 4 (Ibu Basyaria)	1. Apakah Bapak/Ibu semua masyarakat sudah mengetahui peraturan menteri sosial no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan?	Tidak mengetahui
		2. Sepengetahuan Bapak/Ibu apakah program keluarga harapan sudah diberikan kepada yang berhak menerima, khususnya di kecamatan tanjung tiram ini?	Belum tepat sasaran
		3. Coba bapak/ibu berikan penjelasan, apa saja berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari program keluarga harapan yang dicanangkan pemerintah?	Fotocopy KTP dan KK
		4. Bisakah bapak/ibu jelaskan apa saja bentuk bantuan dari program keluarga harapan?	Beras 10 kg, Telur 10, Kacang 1/2, Labu Jipang 3 + Uang Rp. 300.000
		5. Sepengetahuan bapak/ibu, adakah masyarakat yang memang sudah bisa dikatakan taraf hidupnya sejahtera tetapi tetap saja masih menerima bantuan dari program keluarga harapan ini?	Tidak berhak tapi mendapat
		6. Menurut bapak/ibu, apakah program keluarga harapan sudah tepat sasaran seperti yang diharapkan?	Belum tepat sasaran
		7. Bolehkan bapak/ibu memberikan siapa-siapa saja orang yang memang mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan ini, tetapi pada kenyataan sesungguhnya yang bersangkutan tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan yakni sudah mampu secara finansial?	-

No.	Nama Responden	Petanyaan Pewawancara	Jawaban Responden
5.	RESPONDEN 5 (Bg Irfan)	1. Apakah Bapak/Ibu semua masyarakat sudah mengetahui peraturan menteri sosial no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan?	Tidak mengetahui.

		2. Sepengetahuan Bapak/Ibu apakah program keluarga harapan sudah diberikan kepada yang berhak menerima, khususnya di kecamatan tanjung tiram ini?	Ada yang tidak berhak dan ada yang tidak.
		3. Coba bapak/ibu berikan penjelasan, apa saja berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari program keluarga harapan yang dicanangkan pemerintah?	Fotocopy KTP dan KK, Raport
		4. Bisakah bapak/ibu jelaskan apa saja bentuk bantuan dari program keluarga harapan?	Sembako, Uang Rp. 300.000
		5. Sepengetahuan bapak/ibu, adakah masyarakat yang memang sudah bisa dikatakan taraf hidupnya sejahtera tetapi tetap saja masih menerima bantuan dari program keluarga harapan ini?	Masih banyak
		6. Menurut bapak/ibu, apakah program keluarga harapan sudah tepat sasaran seperti yang diharapkan?	Belum Tepat Sasaran
		7. Bolehkan bapak/ibu memberikan siapa-siapa saja orang yang memang mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan ini, tetapi pada kenyataan sesungguhnya yang bersangkutan tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan yakni sudah mampu secara finansial?	-

No.	Nama Responden	Petanyaan Pewawancara	Jawaban Responden
6.	RESPONDEN 6 (Ibu Nurhayati)	1. Apakah Bapak/Ibu semua masyarakat sudah mengetahui peraturan menteri sosial no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan?	Tidak mengetahui.
		2. Sepengetahuan Bapak/Ibu apakah program keluarga harapan sudah diberikan kepada yang berhak menerima, khususnya di kecamatan tanjung tiram ini?	Tidak mengetahui
		3. Coba bapak/ibu berikan penjelasan, apa saja berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari program keluarga harapan yang dicanangkan pemerintah?	Fotocopy KTP dan KK
		4. Bisakah bapak/ibu jelaskan apa saja bentuk bantuan dari program keluarga harapan?	Sembako, Uang
		5. Sepengetahuan bapak/ibu, adakah masyarakat yang memang sudah bisa dikatakan taraf hidupnya sejahtera tetapi tetap saja masih menerima bantuan dari program keluarga harapan ini?	Tidak mengetahui

		6. Menurut bapak/ibu, apakah program keluarga harapan sudah tepat sasaran seperti yang diharapkan?	Sudah tepat sasaran
		7. Bolehkan bapak/ibu memberikan siapa-siapa saja orang yang memang mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan ini, tetapi pada kenyataan sesungguhnya yang bersangkutan tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan yakni sudah mampu secara finansial?	-

No.	Nama Responden	Petanyaan Pewawancara	Jawaban Responden
7.	RESPONDEN 7 (Kak Maya)	1. Apakah Bapak/Ibu semua masyarakat sudah mengetahui peraturan menteri sosial no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan?	Tidak mengetahui
		2. Sepengetahuan Bapak/Ibu apakah program keluarga harapan sudah diberikan kepada yang berhak menerima, khususnya di kecamatan tanjung tiram ini?	Sudah
		3. Coba bapak/ibu berikan penjelasan, apa saja berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari program keluarga harapan yang dicanangkan pemerintah?	Fotocopy KTP dan KK
		4. Bisakah bapak/ibu jelaskan apa saja bentuk bantuan dari program keluarga harapan?	Sembako, Uang
		5. Sepengetahuan bapak/ibu, adakah masyarakat yang memang sudah bisa dikatakan taraf hidupnya sejahtera tetapi tetap saja masih menerima bantuan dari program keluarga harapan ini?	Tepat sasaran
		6. Menurut bapak/ibu, apakah program keluarga harapan sudah tepat sasaran seperti yang diharapkan?	Tepat sasaran
		7. Bolehkan bapak/ibu memberikan siapa-siapa saja orang yang memang mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan ini, tetapi pada kenyataan sesungguhnya yang bersangkutan tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan yakni sudah mampu secara finansial?	Lansia, anak sekolah, balita

No.	Nama Responden	Petanyaan Pewawancara	Jawaban Responden
8.	RESPONDEN 8 (Ibu Yusniar)	1. Apakah Bapak/Ibu semua masyarakat sudah mengetahui peraturan menteri sosial no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan?	Tidak mengetahui.
		2. Sepengetahuan Bapak/Ibu apakah program keluarga harapan sudah diberikan kepada yang berhak menerima, khususnya di kecamatan tanjung tiram ini?	Tidak tepat sasaran
		3. Coba bapak/ibu berikan penjelasan, apa saja berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari program keluarga harapan yang dicanangkan pemerintah?	Fotocopy KTP dan KK
		4. Bisakah bapak/ibu jelaskan apa saja bentuk bantuan dari program keluarga harapan?	Beras 15 Kg, Kacang Hijau ½, Telur 1 papan
		5. Sepengetahuan bapak/ibu, adakah masyarakat yang memang sudah bisa dikatakan taraf hidupnya sejahtera tetapi tetap saja masih menerima bantuan dari program keluarga harapan ini?	Masih banyak yang menerima padahal taraf hidup sudah tercukupi.
		6. Menurut bapak/ibu, apakah program keluarga harapan sudah tepat sasaran seperti yang diharapkan?	Tidak tepat sasaran.
		7. Bolehkan bapak/ibu memberikan siapa-siapa saja orang yang memang mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan ini, tetapi pada kenyataan sesungguhnya yang bersangkutan tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan yakni sudah mampu secara finansial?	

No.	Nama Responden	Petanyaan Pewawancara	Jawaban Responden
9.	RESPONDEN 9 (Kak Jumia)	1. Apakah Bapak/Ibu semua masyarakat sudah mengetahui peraturan menteri sosial no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan?	Tidak mengetahui
		2. Sepengetahuan Bapak/Ibu apakah program keluarga harapan sudah diberikan kepada yang berhak menerima, khususnya di kecamatan tanjung tiram ini?	Ada yang sudah dan ada yang belum
		3. Coba bapak/ibu berikan penjelasan, apa saja berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari program keluarga harapan yang dicanangkan pemerintah?	Fotocopy KTP dan KK, Kartu PKH, Raport
		4. Bisakah bapak/ibu jelaskan apa saja bentuk bantuan dari program keluarga harapan?	Uang, Beras, Kacang Hijau, Telur, Buncis

		5. Sepengetahuan bapak/ibu, adakah masyarakat yang memang sudah bisa dikatakan taraf hidupnya sejahtera tetapi tetap saja masih menerima bantuan dari program keluarga harapan ini?	Banyak belum tepat
		6. Menurut bapak/ibu, apakah program keluarga harapan sudah tepat sasaran seperti yang diharapkan?	Tidak mengetahui
		7. Bolehkan bapak/ibu memberikan siapa-siapa saja orang yang memang mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan ini, tetapi pada kenyataan sesungguhnya yang bersangkutan tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan yakni sudah mampu secara finansial?	

No.	Nama Responden	Pertanyaan Pewawancara	Jawaban Responden
10.	RESPONDEN 10 (Ibu Ariani)	1. Apakah Bapak/Ibu semua masyarakat sudah mengetahui peraturan menteri sosial no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan?	Mengetahui.
		2. Sepengetahuan Bapak/Ibu apakah program keluarga harapan sudah diberikan kepada yang berhak menerima, khususnya di kecamatan tanjung tiram ini?	Ada yang sudah dan ada yang tidak
		3. Coba bapak/ibu berikan penjelasan, apa saja berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari program keluarga harapan yang dicanangkan pemerintah?	Sembako, Uang
		4. Bisakah bapak/ibu jelaskan apa saja bentuk bantuan dari program keluarga harapan?	Fotocopy KTP dan KK
		5. Sepengetahuan bapak/ibu, adakah masyarakat yang memang sudah bisa dikatakan taraf hidupnya sejahtera tetapi tetap saja masih menerima bantuan dari program keluarga harapan ini?	Tidak tepat sasaran
		6. Menurut bapak/ibu, apakah program keluarga harapan sudah tepat sasaran seperti yang diharapkan?	Ada yang tepat dan ada yang tidak sasaran
		7. Bolehkan bapak/ibu memberikan siapa-siapa saja orang yang memang mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan ini, tetapi pada kenyataan sesungguhnya yang bersangkutan tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan yakni sudah mampu secara finansial?	

No.	Nama Responden	Petanyaan Pewawancara	Jawaban Responden
11.	RESPONDEN 11 (NurElfrida)	1. Apakah Bapak/Ibu semua masyarakat sudah mengetahui peraturan menteri sosial no. 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan?	Tidak mengetahui.
		2. Sepengetahuan Bapak/Ibu apakah program keluarga harapan sudah diberikan kepada yang berhak menerima,khususnya di kecamatan tanjung tiram ini?	Sudah tetap sasaran.
		3. Coba bapak/ibu berikan penjelasan, apa saja berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari program keluarga harapan yang dicanangkan pemerintah?	Fotocopy KTP dan KK
		4. Bisakah bapak/ibu jelaskan apa saja bentuk bantuan dari program keluarga harapan?	Beras 10 Kg, Uang, Telur 13, Labu Jipang 2
		5. Sepengetahuan bapak/ibu, adakah masyarakat yang memang sudah bisa dikatakan taraf hidupnya sejahtera tetapi tetap saja masih menerima bantuan dari program keluarga harapan ini?	Banyak belum tepat sasaran
		6. Menurut bapak/ibu, apakah program keluarga harapan sudah tepat sasaran seperti yang diharapkan?	Belum tepat sasaran
		7. Bolehkan bapak/ibu memberikan siapa-siapa saja orang yang memang mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan ini, tetapi pada kenyataan sesungguhnya yang bersangkutan tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan yakni sudah mampu secara finansial?	-

RIWAYAT HIDUP



IMAM AZHARI

Tanjung tiram, 24 Maret 1996

Contac



Jl.Kartini Lk.IV
kecamatan Tanjung
Tiram Kabupaten
Batu Bara

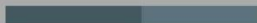


082276466476



imamazhari024@gmail.com

Software Skill



Soft Skill

- English & Melayu
- Instalation Computer

Formal Education

2002 - 2008 : SDN 010163 Sukamaju,Sumut
2008 - 2011 : SMP Negeri 1 Tanjung Tiram, Sumut
2011 - 2014 : SMA Daerah Sei Bejangkar, Sumut
2016 - Sekarang : S1 - UIN Sumatera Utara (Hukum Tata Negara)

Non Formal Education

2007 : pelatihan Sanggar Seni Tari
2013 : Pelatihan kursus komputer Ms. Word dan Ms. Excel
2015 : pelatihan Marketing

Experiences & Awards

2008 : perwakilan Tari Kabupaten
2012-2013 : Wakil Osis SMA Daerah Sei Bejangkar
2013 : juara 3 UKM terbaik pengembangan sentra pengolahan Hasil
Sumut
2013 : pelatihan LTTG (lembaga teknologi tepat Guna)
2015 : Pelatihan Marketing
2018 : Delegasi Indonesia Program FFI (Friendship From Indonesia),
di Korea Selatan
2018 : Anggota Perdamaian IPYG Korea Utara dan Korea Selatan